

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait (Zen & Hidayat, 2024). Laporan keuangan disusun dan digunakan oleh manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Pertanggungjawaban tersebut diukur dari kinerja keuangan yang dicapai oleh manajemen, yang tercermin dalam laba dan rugi yang dihasilkan (Luthan et al., 2016). Oleh karena itu, laporan keuangan dituntut untuk mampu memberikan informasi yang relevan, andal, dan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.

Manajemen laba merupakan tindakan oportunistik manajemen yang mengubah pendapatan dan laba untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya (Dewi & Mita, 2019). Praktik manajemen laba dilakukan melalui penggunaan teknik akuntansi untuk secara sengaja memengaruhi atau memanipulasi laba yang dilaporkan perusahaan guna mencapai tujuan keuangan tertentu. Praktik tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai pemangku kepentingan serta menimbulkan kekhawatiran dari sisi etika, keuangan, dan regulasi karena dapat mengaburkan kinerja keuangan perusahaan yang sebenarnya (Usman & Yahaya, 2025).

Pendekatan kegunaan keputusan dalam teori akuntansi berpandangan bahwa apabila laporan keuangan tidak dapat disusun secara teoretis sepenuhnya benar,

maka setidaknya laporan tersebut harus dibuat agar lebih berguna bagi pengambilan keputusan. Kerangka konseptual mengadopsi kebutuhan keputusan investor sebagai tujuan utama pelaporan keuangan. Dalam kondisi yang tidak ideal, nilai perusahaan tidak dapat dibaca secara langsung dari laporan keuangan sehingga diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan pengguna laporan keuangan. Dengan memahami permasalahan keputusan tersebut, akuntan akan lebih siap dalam memenuhi kebutuhan informasi berbagai kelompok pemangku kepentingan (Scott, 2015).

Namun dalam praktiknya, laba bersih bukanlah prediktor hasil yang tidak bias. Manajer sering kali melakukan manajemen laba, dan untuk memahami peran laba bersih sebagai ukuran kinerja perlu dipertimbangkan kemungkinan bahwa manajer dapat membiaskan atau mengelola laba yang dilaporkan. Jika pemilik tidak dapat mengamati laba bersih yang belum dimanipulasi, manajer dapat mengelola laba untuk memaksimalkan kompensasinya. Kondisi ini dimungkinkan karena manajer memiliki kemampuan untuk memengaruhi sistem akuntansi sehingga laba yang dilaporkan berpotensi dibiasakan untuk kepentingannya sendiri (Scott, 2015). Manajer memiliki insentif yang kuat untuk memastikan bahwa laba yang dilaporkan dapat memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi investor, karena perusahaan yang melaporkan laba lebih tinggi dari yang diharapkan cenderung mengalami kenaikan harga saham, sedangkan kegagalan memenuhi ekspektasi tersebut dapat menyebabkan penurunan harga saham yang signifikan. Oleh karena itu, manajemen laba sering digunakan sebagai sarana untuk menyesuaikan laba agar sesuai dengan harapan pasar (Scott, 2015). Manajemen laba tidak selalu dilakukan

dengan cara meningkatkan laba, tetapi juga dapat dilakukan dengan menurunkan laba melalui penggunaan akrual diskresioner. Penurunan laba ini umumnya dilakukan sebagai bagian dari strategi perusahaan, misalnya untuk mengurangi tekanan kontraktual atau menunjukkan kondisi keuangan yang lebih konservatif kepada pihak eksternal (Scott, 2015). Oleh karena itu, praktik manajemen laba, baik melalui peningkatan maupun penurunan laba, menunjukkan adanya fleksibilitas manajer dalam memanfaatkan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan tertentu, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas informasi laporan keuangan.

Fenomena pertama terjadi pada PT Indofarma Tbk (INAF). Perusahaan farmasi pelat merah ini terjerat kasus indikasi penyimpangan keuangan melalui anak usahanya, Indofarma Global Medika. Ditemukan adanya dana sebesar Rp470 miliar yang seharusnya disetorkan ke Indofarma namun tidak dilakukan, sehingga menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif memperkirakan potensi kerugian negara mencapai Rp371,8 miliar yang kemudian ditindaklanjuti hingga ke Kejaksaan Agung. Kasus ini mencerminkan adanya praktik manipulasi dan lemahnya pengawasan manajemen, yang berpotensi mendorong terjadinya manajemen laba melalui rekayasa pencatatan keuangan, sehingga informasi yang disajikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya (Puspadini, 2024). Secara ideal, tata kelola perusahaan yang baik mensyaratkan adanya pengawasan berlapis terhadap transaksi antarperusahaan dalam grup usaha, khususnya transaksi antara perusahaan induk dan anak usaha, guna mencegah penyalahgunaan dana maupun manipulasi pencatatan keuangan.

Dampak dari lemahnya pengawasan pada kasus Indofarma tidak hanya berupa kerugian finansial negara sebesar Rp371,8 miliar, tetapi juga berdampak pada turunnya kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap kredibilitas laporan keuangan perusahaan pelat merah di sektor *healthcare* secara lebih luas. Kasus ini mengindikasikan lemahnya fungsi pengawasan komisaris independen serta minimnya keterlibatan komite audit dalam mendeteksi penyimpangan pencatatan keuangan pada anak usaha, sehingga relevan dengan variabel komisaris independen dan ukuran komite audit yang diuji dalam penelitian ini.

Fenomena berikutnya menimpa PT Kimia Farma Tbk (KAEF), yang sempat mengalami suspensi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) akibat dugaan manipulasi laporan keuangan tahun buku 2023. Perusahaan kemudian melakukan restatement laporan keuangan setelah ditemukan adanya manipulasi pada akun persediaan dan utang usaha di anak perusahaan, PT Kimia Farma Apotek (KFA). Peristiwa ini menunjukkan adanya praktik manajemen laba melalui pengaturan akun-akun akrual, khususnya pada persediaan dan kewajiban, yang dilakukan untuk memengaruhi kinerja keuangan yang dilaporkan kepada publik. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dalam membatasi perilaku oportunistik manajemen (Adventy, 2025). Secara ideal, komite audit yang memiliki keahlian keuangan memadai serta auditor eksternal yang independen seharusnya mampu mendeteksi kejanggalan pada akun persediaan dan utang usaha sebelum laporan keuangan dipublikasikan. Dampak dari kegagalan deteksi ini adalah suspensi perdagangan saham KAEF di BEI serta kewajiban perusahaan melakukan restatement laporan keuangan, yang pada

akhirnya merusak kredibilitas perusahaan farmasi BUMN di mata investor pasar modal. Manipulasi pada akun persediaan dan utang usaha tersebut turut mengindikasikan lemahnya deteksi oleh auditor eksternal maupun komite audit dalam menilai kewajaran akrual, sehingga fenomena ini berkaitan langsung dengan variabel keahlian keuangan komite audit dan *audit tenure* yang diuji dalam penelitian ini sebagai variabel moderasi.

Fenomena selanjutnya terjadi pada PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) ketika Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan saham MIKA mengalami *Unusual Market Activity* (UMA) akibat ditemukannya pola transaksi yang tidak wajar. BEI kemudian meminta investor untuk berhati-hati dan mencermati keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Penetapan UMA tersebut mengindikasikan adanya aktivitas pasar yang tidak wajar sehingga mendorong perlunya kehati-hatian dalam menafsirkan informasi yang disampaikan perusahaan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya transparansi dan kualitas pelaporan keuangan, karena keterbatasan informasi yang andal dapat membuka peluang terjadinya praktik oportunistik manajemen, termasuk manajemen laba (Binekasri, 2023). Secara ideal, keberadaan mekanisme tata kelola formal seperti komitisaris independen dan komite audit seharusnya mampu mencegah timbulnya pola transaksi yang mencurigakan sebelum terdeteksi otoritas bursa. Dampak dari penetapan status UMA ini adalah meningkatnya kehati-hatian investor terhadap saham MIKA serta menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan internal perusahaan sektor *healthcare* yang telah menerapkan struktur tata kelola formal. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme tata

kelola formal tidak selalu diikuti dengan transparansi aktual, sehingga menegaskan perlunya menguji efektivitas komisaris independen, keberagaman gender direksi, dan komite audit secara empiris, bukan sekadar keberadaannya secara struktural.

Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Martusa et al., 2023). Tata kelola perusahaan yang buruk memberi peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat mengakibatkan krisis ekonomi (Haliza, 2022). Tata kelola perusahaan dijalankan melalui berbagai mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen menjalankan perusahaan secara transparan dan akuntabel. Mekanisme tersebut tercermin dalam struktur dewan komisaris, karakteristik dewan direksi, serta keberadaan komite audit yang berperan dalam mengawasi aktivitas manajemen dan proses pelaporan keuangan perusahaan. Melalui mekanisme pengawasan tersebut, tata kelola perusahaan diharapkan mampu membatasi perilaku oportunistik manajemen, termasuk praktik manajemen laba dalam penyusunan laporan keuangan.

Dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit merupakan komponen penting di dalam perusahaan. Secara umum dewan komisaris bertugas dalam fungsi pengawasan yang akan dibantu oleh komite audit, sedangkan dewan direksi bertanggung jawab atas pencapaian visi dan misi perusahaan sesuai dengan anggaran dan peraturan yang berlaku (Fitroni & Feliana, 2022).

Dewan komisaris berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen serta menjadi penghubung antara pemegang saham dan manajemen perusahaan sehingga

informasi keuangan yang disampaikan dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Maulida & Dul Muid, 2019). Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, keberadaan komisaris independen menjadi sangat penting karena diharapkan mampu memberikan pengawasan yang lebih objektif dan independen terhadap tindakan manajemen. Proporsi komisaris independen yang lebih besar diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta mengurangi kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba dalam penyusunan laporan keuangan.

Selain komisaris independen, karakteristik dewan direksi juga dapat memengaruhi praktik manajemen laba, salah satunya adalah gender. Gender merupakan salah satu karakteristik yang banyak mendapat perhatian dalam penelitian tata kelola perusahaan (Halila et al., 2022). Perempuan diyakini memiliki potensi memberikan dampak besar ketika menempati posisi di perusahaan karena memiliki gaya komunikasi yang lebih fleksibel dengan berbagai pemangku kepentingan (Meyditiyaa et al., 2024). Selain itu, etos kerja perempuan yang berbeda dengan laki-laki berkaitan dengan tingkat kedisiplinan serta keterlibatan yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas perusahaan (Prmaisella & Lestari, 2023). Dalam konteks *corporate governance*, terdapat isu mengenai *board diversity* berbasis gender, di mana direksi bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan sehingga berpotensi terlibat dalam proses manipulasi laporan seperti praktik manajemen laba (Megawati & Sulfitri, 2023). Keragaman gender dalam kelompok kerja juga dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang lebih beragam

sehingga mampu mengevaluasi suatu permasalahan secara lebih luas (Fitroni & Feliana, 2022).

Komite audit memiliki peran dalam mengurangi konflik keagenan antara perusahaan dan pemangku kepentingan eksternal melalui fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan (Widijaya & Veronica, 2022). Dalam menjalankan fungsi tersebut, kemampuan untuk mendeteksi praktik manajemen laba menjadi hal yang penting, sehingga diperlukan keahlian khusus (Hariani et al., 2020). Keahlian tersebut mencakup pemahaman di bidang akuntansi dan keuangan yang memungkinkan komite audit menilai laporan keuangan secara lebih tepat (Hariani et al., 2020). Selain itu, pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan membantu komite audit dalam melakukan pengawasan serta koreksi terhadap laporan keuangan yang disusun manajemen sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih andal bagi pengguna (Reynaldi et al., 2024). Oleh karena itu, efektivitas pengawasan laporan keuangan menuntut adanya setidaknya satu anggota komite audit yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi (Reynaldi et al., 2024).

Komite audit berperan penting dalam menjaga kualitas penyajian laporan keuangan guna meminimalkan praktik manajemen laba (Katharina & Tambunan, 2022). Keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sehingga dapat menekan tindakan oportunistik manajemen (Ulina et al., 2018). Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut adalah ukuran komite audit, di mana jumlah anggota yang lebih besar cenderung meningkatkan kapasitas pengawasan dan berpotensi mengurangi praktik manajemen laba (Ulina

et al., 2018). Selain itu, semakin besar ukuran komite audit maka pengawasan yang dilakukan menjadi lebih luas sehingga dapat mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal (Maulida & Dul Muid, 2019). Dengan demikian, ukuran komite audit dapat memengaruhi praktik manipulasi keuangan karena komite audit juga berfungsi sebagai pengawas laporan keuangan serta pengendali sistem internal perusahaan (Maulida & Dul Muid, 2019).

Audit tenure merupakan lamanya masa perikatan antara auditor dengan klien yang disepakati dalam hubungan jasa audit (Agustin & Triani, 2023; Ariyanti et al., 2022). Dalam menjalankan tugasnya, auditor dituntut untuk memiliki sikap independensi, yaitu mampu mempertahankan objektivitas dalam memberikan penilaian atas laporan keuangan demi kepentingan berbagai pihak (Agustin & Triani, 2023). Namun, lamanya hubungan antara perusahaan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat menjadi indikasi menurunnya independensi auditor karena adanya kedekatan dengan manajemen klien (Ariyanti et al., 2022). Di sisi lain, hubungan yang lebih lama juga dapat membuat auditor lebih memahami kondisi perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan kualitas audit dalam mendeteksi praktik manajemen laba (Agustin & Triani, 2023). Oleh karena itu, *audit tenure* menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan karena dapat memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap laporan keuangan serta berpotensi memperkuat atau melemahkan praktik manajemen laba.

Penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba menunjukkan hasil yang masih belum konsisten. Pada variabel komisaris independen, sebagian besar penelitian menemukan adanya pengaruh negatif

signifikan terhadap manajemen laba, seperti Maulida & Dul Muid (2019), Salsabila & Taqwa (2021), Solihah & Rosdiana (2022), Manurung & Syafruddin (2020), Meyditiyaa et al. (2024), dan Sugiarto et al. (2024), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen maka praktik manajemen laba cenderung menurun. Namun demikian, terdapat penelitian lain yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (Widijaya & Veronica, 2022).

Selanjutnya, pada variabel keberagaman gender direksi juga ditemukan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh negatif signifikan, seperti Kusumaningrum & Achmad (2022), sementara penelitian lainnya menemukan pengaruh positif signifikan (Fitroni & Feliana, 2022; Muhammad & Pribadi, 2020; Jusup & Sambuaga, 2022). Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang menyatakan bahwa keberagaman gender direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba (Fatimah, 2019; Megawati & Sulfitri, 2023; Christian & Bangun, 2021; Halila et al., 2022; Meyditiyaa et al., 2024).

Inkonsistensi hasil penelitian juga terlihat pada variabel keahlian keuangan komite audit. Beberapa penelitian menemukan pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, seperti Wijayanti & Prabowo (2020), Maulida & Dul Muid (2019), dan Chandra Mei et al. (2024), sedangkan penelitian lainnya menunjukkan pengaruh positif signifikan (Ningsih et al., 2021; Sari, 2017). Selain itu, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba (Nelwan & Tansuria, 2019; Karina,

2020; Ardyanti & Kurnia, 2023; Reynaldi et al., 2024; D. R. Hidayat et al., 2021; Siagian & Siregar, 2018; Hariani et al., 2020).

Pada variabel ukuran komite audit, hasil penelitian juga menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa penelitian menemukan pengaruh negatif signifikan, seperti Ardyanti & Kurnia (2023), Sari (2017), dan Maulida & Dul Muid (2019), sementara penelitian lain menemukan pengaruh positif signifikan (Widijaya & Veronica, 2022). Namun demikian, terdapat pula penelitian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap manajemen laba (Katharina & Tambunan, 2022; Karina, 2020; Mei Rinta, 2021; Salsabila & Taqwa, 2021; Ulina et al., 2018; Solihah & Rosdiana, 2022).

Selain itu, variabel *audit tenure* juga menunjukkan hasil yang belum konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba (Agustin & Triani, 2023). Namun, penelitian lainnya menunjukkan pengaruh positif signifikan, seperti Kurniawansyah (2016) dan Tran et al. (2022), serta terdapat pula penelitian yang menemukan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (Ulina et al., 2018; Hermatika & Alit Triani, 2022; Ariyanti et al., 2022).

Ketidakkonsistenan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai perbedaan hasil statistik semata, melainkan perlu ditelusuri sumber penyebabnya secara konseptual. Pertama, perbedaan periode penelitian turut menjelaskan variasi hasil, di mana efektivitas mekanisme tata kelola dalam membatasi manajemen laba terbukti berbeda antara periode sebelum dan selama pandemi COVID-19. Penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menemukan

bahwa ukuran dewan direksi baru berpengaruh signifikan dalam menekan manajemen laba selama periode pandemi, namun tidak signifikan pada periode normal, yang mengindikasikan bahwa tekanan krisis mengubah efektivitas fungsi pengawasan dewan (Ulfah et al., 2022).

Kedua, perbedaan konteks kelembagaan antar negara turut berkontribusi terhadap inkonsistensi tersebut. Kim et al. (2024) menemukan bahwa perusahaan publik di Korea Selatan justru menunjukkan penurunan manajemen laba selama pandemi, sementara perusahaan swasta tidak menunjukkan perubahan signifikan, karena perusahaan publik berada di bawah pengawasan dan intervensi pemerintah yang lebih kuat. Sebaliknya, Lassoued dan Khanchel (2021) yang meneliti perusahaan swasta di 15 negara Eropa menemukan peningkatan manajemen laba yang bersifat menaikkan laba setelah pandemi berlangsung. Perbedaan arah temuan antara kedua konteks negara ini menunjukkan bahwa kekuatan mekanisme tata kelola dalam membatasi manajemen laba bersifat kontekstual, bergantung pada kualitas pengawasan kelembagaan, karakteristik kepemilikan, dan periode observasi.

Ketiga, perbedaan pendekatan pengukuran manajemen laba turut menjadi sumber variasi hasil, karena model deteksi akrual diskresioner yang berbeda dapat menghasilkan nilai manajemen laba yang tidak sama meskipun menggunakan data yang identik. Penelitian pada perusahaan sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa model Jones dan model Dechow (modified Jones) menghasilkan nilai akrual diskresioner yang cukup berbeda satu sama lain, meskipun diterapkan pada sampel dan periode yang sama, sehingga turut

memengaruhi kesimpulan pengujian hipotesis (Alfhira et al., 2024). Dengan demikian, research gap dalam penelitian ini bukan hanya berupa inconsistent findings, melainkan conceptual gap mengenai kondisi apa yang menyebabkan mekanisme tata kelola perusahaan efektif atau tidak efektif dalam membatasi manajemen laba, sehingga penggunaan *audit tenure* sebagai variabel moderasi menjadi relevan untuk menjelaskan kondisi tersebut, khususnya pada konteks sektor *healthcare* pasca pandemi COVID-19 di Indonesia.

Keunikan penelitian ini tidak semata terletak pada penggunaan *audit tenure* sebagai variabel moderasi, mengingat pendekatan tersebut telah banyak digunakan pada berbagai sektor. Kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi konteks yang diuji, yaitu: (a) sektor *healthcare* di Indonesia pada periode pasca pandemi COVID-19, ketika tekanan menjaga stabilitas kinerja keuangan meningkat secara khusus pada sektor ini; (b) karakteristik tata kelola perusahaan sektor kesehatan yang beroperasi di bawah pengawasan berlapis dari beberapa regulator sekaligus (Kementerian Kesehatan, BPOM, OJK, dan BEI), yang berbeda dari sektor manufaktur maupun keuangan yang lebih umum diteliti dalam literatur manajemen laba; dan (c) implikasi regulasi yang berkembang, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Republik Indonesia, 2023) beserta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaannya (Republik Indonesia, 2024), serta Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.05/2025 tentang penyelenggaraan asuransi kesehatan (Otoritas Jasa Keuangan, 2025) yang mensyaratkan tata kelola risiko dan pelaporan data yang lebih ketat bagi entitas terkait layanan kesehatan. Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa tekanan

pengawasan pada sektor *healthcare* terus meningkat, sehingga menjadikan pengujian efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dengan *audit tenure* sebagai moderasi pada sektor ini relevan dan kontekstual, bukan sekadar replikasi model penelitian yang sudah ada.

Berdasarkan uraian tersebut, mekanisme tata kelola perusahaan diperkirakan berperan penting dalam membatasi praktik manajemen laba, namun efektivitasnya bergantung pada kondisi kontekstual yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu periode penelitian, konteks kelembagaan antarnegara, serta pendekatan pengukuran manajemen laba yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *audit tenure* sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah lamanya hubungan antara auditor dan perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara tata kelola perusahaan dan manajemen laba, khususnya pada konteks sektor *healthcare* pasca pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menempatkan *audit tenure* sebagai variabel moderasi serta menguji beberapa mekanisme tata kelola perusahaan, yaitu komisaris independen, keberagaman gender direksi, keahlian keuangan komite audit, dan ukuran komite audit, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian keunikan penelitian di atas. Sebagai elaborasi lebih lanjut mengenai konteks sektor yang diteliti, berikut diuraikan alasan pemilihan sektor *healthcare* secara lebih rinci.

Sektor *healthcare* dipilih dalam penelitian ini karena memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia serta mengalami pertumbuhan yang signifikan setelah pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mencatat pertumbuhan sebesar

10,46% pada tahun 2021, yang merupakan pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi dibandingkan lapangan usaha lainnya (BPS, 2022). Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa sektor *healthcare* mengalami peningkatan aktivitas operasional dan tekanan kinerja yang cukup besar pasca pandemi COVID-19. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan dan laba perusahaan guna mempertahankan kepercayaan investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam kondisi demikian, peluang terjadinya praktik manajemen laba menjadi semakin besar karena manajemen memiliki insentif untuk menampilkan kinerja perusahaan yang tetap stabil di tengah dinamika industri *healthcare* yang terus berkembang.

Selain itu, sektor *healthcare* juga merupakan sektor yang sensitif terhadap kualitas informasi laporan keuangan karena berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat, investasi publik, serta pengawasan regulator. Oleh karena itu, transparansi dan efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan menjadi sangat penting untuk meminimalkan perilaku oportunistik manajemen dalam proses pelaporan keuangan.

Selain pertumbuhan pasca pandemi, pemilihan sektor *healthcare* juga didasarkan pada karakteristik industri yang secara struktural rentan terhadap praktik manajemen laba. Sektor ini beroperasi di bawah tingkat regulasi yang tinggi dan tekanan reputasi yang besar, karena kegagalan menjaga kepercayaan publik dapat berdampak langsung pada keberlangsungan izin usaha dan hubungan dengan otoritas kesehatan. Bukti empiris pada rumah sakit di luar negeri menunjukkan bahwa entitas sektor kesehatan cenderung mengelola akrual, khususnya pada akun-

akun yang bersifat estimatif seperti piutang tak tertagih dan cadangan kerugian, untuk menghasilkan laba yang stabil dan menghindari sorotan regulator maupun pemangku kepentingan (Leone & Van Horn, 2005). Bukti serupa juga ditemukan pada rumah sakit *for-profit* di Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa manajer memanfaatkan akrual diskresioner untuk membentuk cadangan yang lebih besar ketika laba sebelum manajemen tinggi, dan menaikkan laba yang dilaporkan ketika laba sebelum manajemen rendah, sehingga mengindikasikan besarnya ruang diskresi manajemen dalam mengelola akrual pada entitas kesehatan, baik yang berorientasi nirlaba maupun mencari laba (Cannon et al., 2022). Karakteristik tersebut berbeda dari sektor manufaktur maupun keuangan yang selama ini lebih banyak diteliti dalam literatur manajemen laba di Indonesia, sehingga pengujian pada sektor *healthcare* memberikan konteks industri yang relevan dan belum banyak dieksplorasi.

Dengan mempertimbangkan fenomena manajemen laba yang terjadi pada perusahaan sektor *healthcare*, kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, serta karakteristik industri yang unik pada sektor ini, penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba dengan *audit tenure* sebagai variabel moderasi menjadi relevan untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah keberagaman gender direksi berpengaruh terhadap manajemen laba?

3. Apakah keahlian keuangan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?
4. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?
5. Apakah *audit tenure* memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba?
6. Apakah *audit tenure* memoderasi pengaruh keberagaman gender direksi terhadap manajemen laba?
7. Apakah *audit tenure* memoderasi pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap manajemen laba?
8. Apakah *audit tenure* memoderasi pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba.
2. Menganalisis pengaruh keberagaman gender direksi terhadap manajemen laba.
3. Menganalisis pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap manajemen laba.
4. Menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba.
5. Menganalisis pengaruh *audit tenure* dalam memoderasi hubungan antara komisaris independen dan manajemen laba.
6. Menganalisis pengaruh *audit tenure* dalam memoderasi hubungan antara keberagaman gender direksi dan manajemen laba.
7. Menganalisis pengaruh *audit tenure* dalam memoderasi hubungan antara keahlian keuangan komite audit dan manajemen laba.

8. Menganalisis pengaruh *audit tenure* dalam memoderasi hubungan antara ukuran komite audit dan manajemen laba.

1.4 Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dalam bidang tata kelola perusahaan dan akuntansi keuangan, khususnya terkait praktik manajemen laba pada perusahaan sektor *healthcare*. Kontribusi teoritis penelitian ini meliputi:

- a. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan yang diproksikan melalui komisaris independen, keberagaman gender direksi, keahlian keuangan komite audit, dan ukuran komite audit. terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor *healthcare* di Indonesia.

- b. Menambahkan kajian empiris mengenai peran *audit tenure* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dan manajemen laba.

- c. Memperkuat pengembangan teori agensi (*agency theory*) dengan menunjukkan bahwa *audit tenure* berperan sebagai kondisi kontekstual yang memperkuat atau memperlemah efektivitas mekanisme pengawasan dalam mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen, khususnya pada entitas dengan tingkat regulasi tinggi seperti sektor *healthcare*.

- d. Memperkaya penerapan teori *critical mass* dalam konteks keberagaman gender direksi, dengan pandangan bahwa pengaruh direksi perempuan terhadap manajemen laba baru terlihat signifikan ketika proporsi keterwakilannya melewati

ambang batas tertentu, bukan sekadar keberadaannya secara nominal (*critical mass of female directors* dapat menghasilkan perbaikan luaran keuangan yang lebih konsisten).

2. Kontribusi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan guna meminimalkan praktik manajemen laba dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

b. Bagi regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan terkait tata kelola perusahaan, independensi auditor, dan transparansi laporan keuangan perusahaan.

c. Bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan serta kualitas laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

1.5 Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian (teoritis dan praktis), dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Membahas teori-teori yang relevan, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis dan sumber data, populasi dan sampel, Teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Menyajikan hasil pengolahan data, analisis statistik, dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan tujuan dan hipotesis yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

